

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENERIMAAN
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati periode 2005-2015)**

**ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING INCOME TAX REVENUE FROM
INDIVIDUAL TAXPAYERS
(Case Study at the Tax Office Primary Pati in the period 2005-2015)**

SKRIPSI

Dianjukan Guna Memenuhi Persyaratan untuk Memperoleh
Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Oleh

ISTI QUMAIROH

20130420164

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2016

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENERIMAAN
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati periode 2005-2015)**

ISTI QUMAIROH
20130420164

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Jumlah Wajib Pajak, dan Jumlah Surat Setoran Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati pada periode 2005-2015.

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati pada periode 2005-2015 sebagai sampel. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Teknik pengumpulan data dari laporan tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati dan analisis data menggunakan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, Jumlah Wajib Pajak tidak memiliki pengaruh negatif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, Jumlah Surat Setoran Pajak memiliki pengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Surat Setoran Pajak.

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang ada di Asia Tenggara. Salah satu tujuan nasional negara Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia dalam melaksanakan kegiatannya memerlukan dana yang jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Krisis global yang terjadi di beberapa negara dunia ikut memacu pemerintah dalam membenahi semua sektor perekonomian. Dalam membenahi berbagai sektor tersebut diperlukan dana yang tidak sedikit, dan ironisnya akhir-akhir ini pemerintah terlihat sangat sibuk dalam membenahi sektor penerimaan negara yang jumlah defisitnya mencapai angka puluhan milyar rupiah (Safitri, 2011). Dana tersebut didapatkan dari pendapatan negara yang berasal dari meningkatnya penerimaan luar negeri yang didapatkan melalui kegiatan ekspor dan penerimaan dalam negeri yang berasal dari penerimaan pajak saat ini.

Menurut Mardiasmo (2011) Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dilihat dari grafik penerimaan negara pada sektor pajak dari tahun ke tahun menunjukkan tren positif, hal ini tidak terlepas dari semakin baiknya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya peranan pajak dalam pembangunan negara.

Direktorat jendral pajak di Indonesia berkeinginan meningkatkan penerimaan pajak dengan melaksanakan program intensifikasi pajak dengan memperluas sektor sumber penghasilan pajak yang dimulai dari perkebunan kelapa sawit kemudian disusul yaitu konstruksi, properti, bubur kertas dan kertas, serta batu bara (Amaliyah, 2010). Pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang dilaksanakannya (Hendra, 2011).

Bagi pemerintah, pemungutan pajak masih sulit dilakukan oleh negara karena rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada administrasi pengelolaan pajak di pemerintahan dan banyaknya masyarakat beranggapan bahwa membayar pajak hanya dijadikan sapi perahan oleh penguasa pada zaman penjajahan. Kecenderungan melakukan penghindaran oleh Wajib Pajak lebih banyak terjadi karena sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menggunakan *self assessment*. Hal inilah yang menyebabkan Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan tidak patuh dalam melaksanakan kewajibannya sehingga menimbulkan rendahnya penerimaan pajak.

Penerimaan pajak adalah penghasilan yang didapatkan pemerintah dari pembayaran pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan. Tercapainya penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung antara lain jumlah Wajib Pajak, tingkat

kepatuhan dan kedisiplinan nasional yang tinggi oleh Wajib Pajak, dan jumlah surat setoran pajak.

Untuk dapat mengidentifikasi adanya kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan perpajakannya dapat dilihat dari kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan usahanya sebagai pengusaha kena pajak dan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, selain itu dapat dilihat dari penyetoran kembali surat pemberitahuan. Banyaknya Wajib Pajak yang melanggar kewajibannya untuk membayar pajak tepat waktu, sehingga banyak menimbulkan isu ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam perpajakan. Isu tersebut menjadi penting karena dapat menimbulkan upaya Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak dan dapat terjadi pengurangan penyetoran dana pajak ke kas negara (Safitri, 2011). Tingkat jumlah Wajib Pajak sangat mempengaruhi pendapatan pajak yang akan di terima oleh negara, karena semakin banyak jumlah Wajib Pajak maka akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Seperti halnya jumlah Wajib Pajak, semakin banyaknya jumlah surat setoran pajak maka akan meningkatkan penerimaan pajak negara.

Dengan demikian penelitian ini mengambil beberapa variabel antara lain jumlah Wajib Pajak, jumlah surat setoran pajak, kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Pati periode 2005-2015** ”.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tiada memperoleh jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut UU No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan, Pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang maupun badan yang sifatnya memaksa namun tetap berdasarkan pada Undang-Undang, dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara juga kemakmuran rakyatnya. Menurut UU Perpajakan Nasional, Pajak ialah iuran wajib rakyat kepada negara berdasarkan peraturan undang-undang tanpa memperoleh imbalan langsung yang digunakan untuk pembiayaan segala pengeluaran secara umum serta pengeluaran pembangunan.

Pajak memiliki fungsi penting yaitu pertama fungsi pajak sebagai *budgetair*, dimana pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai kebutuhan pemerintahan. Kedua fungsi mengatur, pajak sebagai alat untuk mengatur atau mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan, misalnya bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan seperti mengadakan perubahan-perubahan tarif dan memberikan pengecualian-pengecualian, keringanan-keringanan atau sebaliknya, yang ditujukan kepada masalah tertentu (Mardiasmo, 2011).

2. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Safitri (2011) mendefinisikan kepatuhan perpajakan merupakan keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam membayarkan pajak kepada negara. Kepatuhan membayar pajak merupakan salah satu tanggung jawab bagi pemerintah dan rakyat kepada Tuhan, dimana memiliki hak serta kewajiban yang harus dimiliki pemerintah serta rakyat (Tahar, 2014). Kewajiban dari pemerintah adalah melakukan pengaturan penerimaan dan pengeluaran sehingga berhak untuk melakukan pemungutan atas rakyat berdasar perundangundangan yang berlaku. Kepatuhan pajak yang tidak meningkat akan mengancam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini dikarenakan tingkat kepatuhan pajak secara tidak langsung mempengaruhi ketersediaan pendapatan untuk belanja (Chau, 2009).

3. Jumlah Wajib Pajak

Wajib Pajak dapat dibagi menjadi Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan yang melakukan pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak. Wajib pajak memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2011).

4. Jumlah Surat Setoran Pajak

Surat setoran pajak merupakan bukti pembayaran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain ke

kas negara melalui tempat pembayaran yang telah ditentukan oleh Menteri Keuangan (Mardiasmo,2011). Surat setoran pajak ini berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi.

Menurut Anti (2014) surat setoran pajak dibedakan menjadi SSP Standar adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak atau berfungsi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kantor Penerima Pembayaran, dan digunakan sebagai bukti pembayaran dengan bentuk, ukuran, dan isi yang telah ditetapkan.

C. PENELITIAN TERDAHULU DAN PENURUNAN HIPOTESIS

1. Hubungan antara Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang nomor 16 Tahun 2000, batas waktu penyampaian SPT masa paling lambat dua puluh hari setelah akhir masa pajak, sedangkan batas waktu penyampaian SPT tahunan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun pajak. Undang-Undang Nomor 16, Tahun 2000 kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 28, Tahun 2007 dengan perubahan batas waktu penyampaian SPT tahunan paling lambat empat bulan setelah akhir tahun pajak khusus bagi Wajib Pajak badan.

Yosi (2011) ditunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan dan kuat antara kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dengan penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat. Anti (2014) menunjukkan hasil bahwa kepatuhan Wajib

Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Syahputra (2012) menunjukkan hasil yang berbeda dari Yosi (2011) dan Anti (2014) yang menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap efektifitas penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang.

H₁ : Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati periode 2005-2015.

2. Hubungan antara Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan.

Jumlah Wajib Pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak. Jumlah Wajib Pajak yang efektif akan meningkatkan penerimaan pajak. Wajib Pajak dapat dibagi menjadi Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan yang melakukan pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak. Wajib pajak memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2011).

Aisyah (2013) melakukan penelitian yang sama dan menunjukkan hasil bahwa jumlah Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Tetapi penelitian yang dilakukan oleh Gunawan (2015) menunjukkan hasil bahwa jumlah Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Tangerang. Dari penelitian-penelitian sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₂ : Jumlah Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati periode 2005-2015.

3. Hubungan Jumlah Surat Setoran Pajak dengan Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan.

Surat setoran pajak merupakan bukti pembayaran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang telah ditentukan oleh Menteri Keuangan (Mardiasmo,2011). Surat setoran pajak berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. Jumlah surat setoran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah penerimaan pajak. Semakin banyak jumlah surat setoran maka akan semakin banyak pula penerimaan pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

Hariyanto (2014) melakukan penelitian dan mendapatkan hasil bahwa jumlah surat setoran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Gunawan (2012) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu surat setoran pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar. Dari penelitian-penelitian

sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₃ : Jumlah surat setoran pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati periode 2005-2015.

D. METODE PENELITIAN

1. Obyek dan Subyek Penelitian

Obyek di dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak orang pribadi diantaranya ada tingkat kepatuhan pajak, jumlah Wajib Pajak, dan jumlah surat setoran pajak. Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati.

2. Jenis Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian diskriptif kuantitatif yang menghubungkan antara variabel, dengan tujuan menggambarkan hubungan yang terjadi antar variabel yang diteliti. Sedangkan jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis dan sumber data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati yang ada di Kabupaten Pati, Jawa Tengah berupa laporan keuangan Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pati pada periode anggaran 2005-2015.

3. Teknik Pengambilan Sampel

Berdasarkan masalah yang ada dalam penelitian maka peneliti menggunakan metode pemilihan sampel *non probability sampling* dengan pemilihan sampel bertujuan atau *purposive sampling*. Dimana untuk menentukan sampel yang akan digunakan dengan pertimbangan tertentu.

4. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pati pada periode anggaran 2005-2015. Selain itu data juga didapatkan dari tesis, skripsi, dan jurnal-jurnal sebagai pendukung pembuatan penelitian.

E. PEMBAHASAN

Uji Kualitas Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran tentang distribusi frekuensi variabel-variabel penelitian, nilai maksimum, minimum, rata-rata dan standar deviasi. Hasil statistik deskriptif ditunjukkan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2

Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KWP	11	3.64	4.33	3.9881	.29198
JWP	11	10.28	11.77	11.2707	.45766
JSSP	11	11.62	12.46	11.8983	.26387
JPPP	11	4.42	5.09	4.7325	.22869
Valid N (listwise)	11				

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat dilihat statistik deskriptif dari data yang digunakan dalam penelitian dengan periode 2005-2015. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini 11 sampel. Variabel jumlah penerimaan pajak penghasilan memiliki nilai minimum 4,42 ; nilai maksimum 5,09; dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 4,7325 dan standar deviasi sebesar 0,22869.

Variabel kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai minimum 3,64 ; nilai maksimum 4,33; dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,9881 dan standar deviasi sebesar 0,29198.

Variabel jumlah Wajib Pajak memiliki nilai minimum 10,28; nilai maksimum 11,77; dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 11,2707 dan standar deviasi sebesar 0,45766.

Variabel jumlah Surat Setoran Pajak memiliki nilai minimum 11,62 ; nilai maksimum 12,46; dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 11,8983 dan standar deviasi sebesar 0,26387.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dapat digunakan untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *One-Sample*

Kolmogorov-Smirnov Test. Hasil uji normalitas dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel 4.3 Tabel 4.3

		Unstandardize d Residual
N		11
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.06348504
Most Extreme Differences	Absolute	.249
	Positive	.133
	Negative	-.249
Kolmogorov-Smirnov Z		.825
Asymp. Sig. (2-tailed)		.505

Berdasarkan Tabel 4.3. menunjukkan bahwa data residual berdistribusi normal. Didapatkan dari hasil bahwa nilai asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,505 lebih besar dari α (0,05). Jadi, dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal dan model regresi layak untuk dipakai dalam penelitian ini.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui adanya penyimpangan dari syarat-syarat asumsi klasik pada model regresi, dimana dalam model regresi harus dipenuhi syarat tidak adanya heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas menggunakan Uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolute residualnya. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolute residual lebih dari 0,05 maka tidak

terjadi masalah heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel 4.4.

Tabel 4.4
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	3.113	1.946		1.600	.154
	KWP	-.024	.087	-.160	-.276	.790
	JWP	-.067	.042	-.701	-1.589	.156
	JSSP	-.186	.116	-1.116	-1.604	.153

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa nilai sig pada masing-masing variabel lebih besar dari alpha (0,05). Variabel kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,790; jumlah Wajib Pajak sebesar 0,156; jumlah surat setoran pajak sebesar 0,153. Jadi disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi ini.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Uji autokorelasi berguna untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel sebelumnya. Dalam uji autokorelasi menggunakan uji *Durbin Watson* (D-W). Jika nilai DW berada diantara du dan 4-du

berarti tidak terdapat autokorelasi. Hasil uji autokorelasi dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel 4.5.

Tabel 4.5

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.961 ^a	.923	.890	.07588	2.021

Berdasarkan pada tabel 4.5. dapat diketahui bahwa nilai *Durbin Watson* (D-W) sebesar 2,021 lebih besar dari batas atas (*du*) 1,928 dan lebih kecil dari *4-du* (4-1,928) yaitu 2,072. Hal ini berarti model regresi di atas tidak ada masalah autokorelasi ditunjukkan dengan angka *Durbin Watson* (D-W) berada antara *du* tabel dan (*4-du* tabel), sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini layak untuk digunakan.

d. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem Multikolinieritas. Dalam model regresi ganda terdapat suatu hubungan linear antara peubah X maka dapat disebut Multikolinearitas. Pendeteksian uji multikolinearitas ini dapat dilihat dari nilai *variance inflation factors* (VIP), dengan kriteria pengujian yaitu jika nilai $VIP < 10$ maka tidak terdapat

multikolinearitas diantara variabel independen. Hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel 4.6.

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
	(Constant)	-7.873	3.672				-2.144
KWP	.733	.165	.936	4.454	.003	.249	4.010
JWP	.337	.080	.674	4.208	.004	.429	2.331
JSSP	.495	.219	.571	2.260	.058	.173	5.795

Berdasarkan padaa tabel 4.6. diketahui bahwa nilai *tolerance* dari setiap variabel independen lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF dari setiap variabel independen tidak lebih dari 10. VIF masing-masing variabel independen adalah kepatuhan Wajib Pajak sebesar 4,010, jumlah Wajib Pajak 2,331, dan jumlah surat setoran pajak 5,795. Oleh karena itu disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan unntuk menguji hipotesis tentang pengaruh variabel independen kepatuhan Wajib Pajak, jumlah Wajib Pajak, jumlah surat setoran pajak terhadap jumlah penerimaan pajak secara parsial. Hasil analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada Tabel 4.7.

Hasil Analisis Regresi

Coefficients^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-7.873	3.672		-2.144	.069
	KWP	.733	.165	.936	4.454	.003
	JWP	.337	.080	.674	4.208	.004
	JSSP	.495	.219	.571	2.260	.058

Dari tabel 4.7. maka dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$JPPP = -7,873 + 0,733KWP + 0,337JWP + 0,495JSSP$$

Berdasarkan analisis diatas dapat diketahui bahwa semua variabel yaitu kepatuhan Wajib Pajak, jumlah Wajib Pajak, jumlah surat setoran pajak memiliki pengaruh kearah positif terhadap penerimaan pajak

Hasil penelitian (Uji Hipotesis)

1. Uji Koefisien determinasi (Adjusted R Square)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan seberapa jauh kemampuan variabel-variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.961 ^a	.923	.890	.07588	2.021

Berdasarkan pada tabel 4.8 dapat diketahui bahwa Adjusted R Square (R^2) adalah 0,890. Hal ini berarti bahwa 89% variabel penerimaan pajak dapat dijelaskan dengan variabel independen yaitu tingkat kepatuhan Wajib Pajak, jumlah Wajib Pajak, dan jumlah surat setoran pajak. Sisanya sebesar 11% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

2. Uji Simultan (Uji statistik f)

Uji statistik f digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Hasil uji statistik f dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.9.

Tabel 4.9.

Hasil Uji Statistik f

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.483	3	.161	27.944	.000 ^b
Residual	.040	7	.006		
Total	.523	10			

a. Dependent Variable: JPPP

b. Predictors: (Constant), JSSP, JWP, KWP

Sumber: Data sekunder yang diolah

Berdasarkan pada Tabel 4.9 dapat di lihat nilai F_{hitung} sebesar 27,944 dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ maka dapat diartikan bahwa semua variabel independen yaitu jumlah kepatuhan Wajib Pajak, jumlah Wajib Pajak, jumlah surat setoran pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu penerimaan pajak penghasilan.

3. Uji Parsial (Uji Statistik *t*)

Uji statistik *t* digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Hasil dari uji statistik *t* dapat dilihat pada tabel 4.9.

Tabel 4.9.

Hasil Uji Statistik *t*

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-7.873	3.672		-2.144	.069
1 KWP	.733	.165	.936	4.454	.003
JWP	.337	.080	.674	4.208	.004
JSSP	.495	.219	.571	2.260	.058

a. Dependent Variable: JPPP

Sumber: Data sekunder yang diolah

Berdasarkan pada tabel 4.9 dapat dirumuskan persamaan regresi sebagai berikut:

$$JPPP = -7,873 + 0,733KWP + 0,337JWP + 0,495JSSP + \varepsilon$$

Berdasarkan tabel 4.9 hasil pengujian hipotesis satu sampai tiga dijelaskan sebagai berikut:

a. Hipotesis Pertama (H_1)

Dari hasil uji parsial (uji statistik *t*) pada tabel 4.9 menunjukkan variabel kepatuhan Wajib Pajak mempunyai nilai sig $0,003 < 0,05$ dan arah koefisien regresi positif 0,733 yang berarti bahwa variabel kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Dengan

demikian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati periode 2005-2015 dinyatakan diterima.

b. Hipotesis Kedua (H_2)

Dari hasil uji parsial (uji statistik t) pada tabel 4.9 menunjukkan variabel jumlah Wajib Pajak mempunyai nilai sig $0,004 < 0,050$ dan arah koefisien regresi positif $0,337$ yang berarti bahwa variabel jumlah Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Dengan demikian hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan bahwa Jumlah Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati periode 2005-2015 dinyatakan diterima.

c. Hipotesis Ketiga (H_3)

Dari hasil uji parsial (uji statistik t) pada tabel 4.8 menunjukkan variabel jumlah surat setoran pajak mempunyai nilai sig $0,058 > 0,050$ dan arah koefisien regresi positif $0,495$ yang berarti bahwa variabel jumlah surat setoran pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Dengan demikian hipotesis ketiga (H_3) yang menyatakan bahwa jumlah surat setoran pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati periode 2005-2015 ditolak.

PEMBAHASAN HIPOTESIS

1. Hipotesis Pertama

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak dapat menjamin untuk memperbesar pendapatan pajak di Indonesia.

Pajak merupakan tulang punggung penerimaan suatu negara untuk digunakan oleh pemerintah guna membiayai kegiatan pemerintah. Salah satu sumber pembiayaan tersebut adalah dari penerimaan pajak dalam negeri dimana pajak penghasilan orang pribadi termasuk didalamnya. Salah satu syarat bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam menunaikan kewajiban perpajakannya adalah dengan mendaftarkan dirinya di Kantor Pelayanan Pajak setempat. Penerimaan pajak penghasilan sangat dipengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Dengan kata lain kepatuhan wajib pajak akan menciptakan kondisi yang mendukung pencapaian realisasi penerimaan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yosi (2011) ditunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan dan kuat antara kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dengan penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kepatuhan wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat penerimaan pajaknya.

2. Hipotesis Kedua

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak menjamin untuk meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia. Wajib Pajak dalam melaporkan dan membayar pajak merupakan salah satu unsur pokok dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak. Semakin banyak wajib pajak maka penerimaan semakin tinggi karena wajib pajak sadar akan menghitung pajak terutangnya sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya dan sebaliknya, banyaknya Wajib Pajak mempengaruhi penerimaan pajak karena banyaknya jumlah Wajib Pajak apabila mereka patuh dalam melaksanakan perpajakannya akan menambah penerimaan pajak, banyaknya Wajib Pajak di Indonesia terutama di Kabupaten Pati yang patuh dalam melaksanakan perpajakan. Wajib Pajak yang melaksanakan kewajiban pembayaran pajak umumnya mereka yang mengerti dan memahami tentang perpajakan, dan mereka mengerti adanya pengenaan sanksi perpajakan jika mereka tidak melaksanakan pembayaran. Sehingga banyaknya Wajib Pajak ditambah adanya sosialisasi perpajakan dari pemerintahan dan menyebabkan Wajib Pajak mengerti tentang pajak maka penerimaan pajak juga akan mengalami kenaikan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aisyah (2013) melakukan penelitian yang sama dan menunjukkan hasil bahwa jumlah Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan

pajak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin banyaknya jumlah Wajib Pajak maka semakin banyak pula pajak penghasilan Wajib Pajak orang pribadi yang diterima.

3. Hipotesis Ketiga

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah surat setoran pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah surat setoran pajak tidak dapat menjamin untuk meningkatkan tingkat penerimaan pajak di Indonesia.

Surat setoran pajak merupakan bukti pembayaran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang telah ditentukan oleh Menteri Keuangan (Mardiasmo,2011). Surat setoran pajak ini berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi, semakin banyak surat setoran pajak yang disetorkan oleh Wajib Pajak maka akan semakin banyak pula bukti pembayaran pajak yang berarti penerimaan pajak yang diterima pemerintah juga semakin banyak, tetapi banyaknya Wajib Pajak yang tidak mengetahui tentang surat setoran pajak sehingga banyaknya Wajib Pajak yang tidak menyetorkan surat setoran pajak ketempat pembayaran yang telah ditetapkan, hal inilah yang mengakibatkan bahwa surat setoran pajak itu tidak mempengaruhi penerimaan pajak,

biarpun surat setoran tidak disetorkan jika Wajib Pajak telah membayar Pajak maka penerimaan pajak masih bisa meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gunawan (2012) yaitu surat setoran pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa banyak atau tidaknya jumlah surat setoran pajak maka tidak akan berpengaruh pada tingkat penerimaan pajaknya.

F. KESIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak, jumlah Wajib Pajak, dan jumlah surat setoran pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak orang pribadi. Sampel dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati dengan periode penelitian pada tahun 2008 sampai dengan 2015. Data yang digunakan adalah data sekunder dan pengumpulan data dilakukan dengan *purposive sampling*. Berdasarkan analisis dan pengujian data dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.
2. Jumlah Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

3. Jumlah surat setoran pajak berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan-keterbatasan yang dapat menyebabkan hasil penelitian menjadi bias. Keterbatasan penelitian ini antara lain :

1. Penelitian ini hanya memfokuskan tiga variabel yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu Kepatuhan Wajib Pajak, Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Surat Setoran Pajak (SSP).
2. Penelitian ini hanya berfokus pada penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak orang pribadi
3. Penelitian ini hanya menggunakan data selama delapan tahun yaitu tahun 2005-2015
4. Kantor pelayanan pajak yang diteliti hanya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati

3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan oleh penelitian selanjutnya guna memperoleh hasil yang lebih baik diantaranya adalah:

1. Untuk penelitian selanjutnya dapat mengembangkan dengan meneliti tidak hanya satu Kantor Pelayanan Pajak saja, perlu ditambah obyek penelitian.
2. Untuk penelitian selanjutnya perlu menambah sampel penelitian.

3. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambah variabel independen yang mungkin dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi..
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah tahun penelitian.